

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki era reformasi pengelolaan negara, pemerintah mulai membenahi tata kelola pemerintahannya. Reformasi yang terjadi di berbagai bidang menjadi indikator bahwa pemerintah berkeinginan kualitas pelayanan kepada publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Afrianti, 2011: 17). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 antara lain : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tersebut maka sangat diperlukan sistem pengendalian intern. Apabila suatu organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang baik maka kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik, karena tujuan pengendalian intern untuk menentukan keakuratan dan keandalan informasi laporan keuangan dalam suatu organisasi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan. Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008: 412) pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini:

1. Reliabilitas pelaporan keuangan
2. Efektifitas dan efisiensi
3. Ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sangat memerlukan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian intern didesain untuk mengenali apakah sistem pengendalian intern telah memadai dan mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan pengendalian intern.

Adapun kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi pada Kabupaten Bone Bolango berdasarkan temuan BPK RI (Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012) yaitu terdapat 10 kasus di antaranya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 2 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 6 kasus dan kelemahan struktur pengendalian intern 2 kasus. Selain kelemahan sistem pengendalian intern BPK menemukan kasus ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang

mengakibatkan kurangnya keandalan laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Kasus ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang

Kabupaten Bone Bolango

| No | Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang Kabupaten Bone Bolango | Jumlah Kasus | Nilai (Dalam juta Rupiah) |
|----|--|--------------|---------------------------|
| 1 | Kerugian Daerah | 13 | 1.290,02 |
| 2 | Potensi Kerugian Daerah | 1 | 397,83 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 2 | 178,52 |
| 4 | Administrasi | 4 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 2 | 660,25 |
| 6 | Ketidakefisienan | - | - |
| 7 | Ketidakefektifan | 1 | 30,00 |
| | Jumlah | 23 | 2.556,62 |

Sumber: BPK RI Tahun 2012

Dengan adanya temuan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 diantaranya keandalan sehingga berdampak pada ketidakwajaran penyajian. Hal tersebut dikarenakan jumlah kesalahan atau ketidaksesuaian penyajian informasi dalam laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dinyatakan bahwa andal memiliki arti bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dapat diverifikasi secara netral. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Untuk itu pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango harus memberikan perhatian yang lebih terhadap penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Penelitian mengenai sistem pengendalian intern dan keandalan laporan keuangan pernah dilakukan oleh Yulianti (2010) dalam tesisnya yang berjudul "Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan pelaksanaan system pengendalian intern sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemprov Banten serta 6 kabupaten/kota se-Provinsi Banten)" hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaruh peranan audit internal terhadap laporan keuangan secara tidak langsung melalui pelaksanaan system pengendalian intern mempunyai korelasi yang tinggi yaitu 67,7%.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Pakaya (2012) tentang Pengaruh Dimensi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi pada DPPKAD kota Gorontalo) hasil dari penelitiannya membuktikan secara parsial dan simultan dimensi sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Pengaruh Sistem pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern diantaranya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian intern.
2. Terkait dengan penyajian laporan keuangan, BPK masih menemukan kasus yang mengakibatkan kurangnya keandalan laporan keuangan yaitu ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku yang mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kasus administrasi dan ketidakefektifan
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Bone Bolango pada 3 tahun terakhir BPK masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti tidak ada peningkatan dari pemberian opini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah daerah belum optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk menguji dan mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam pengambilan keputusan terkait dengan sistem pengendalian intern dan penyusunan laporan keuangan.